

## ABSTRAK

Pemerataan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerataan pembangunan infrastruktur di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur gampong, kepala dusun, dan masyarakat, serta melalui observasi dan dokumentasi terhadap kegiatan pembangunan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Gampong Uteun Bayi belum sepenuhnya merata di seluruh dusun. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi ketimpangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya finansial, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, serta adanya kendala teknis dan administratif seperti perselisihan batas wilayah dengan gampong tetangga. Selain itu, masih ditemukan masyarakat yang belum mengetahui atau tidak dilibatkan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan di tingkat gampong belum sepenuhnya transparan dan partisipatif. Meskipun demikian, pemerintah gampong telah berupaya melakukan pemerataan pembangunan melalui perencanaan yang melibatkan perangkat desa. Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan prioritas kebutuhan masyarakat di setiap dusun. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah gampong dalam mendorong pemerataan pembangunan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah masalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur di Gampong Uteun Bayi memerlukan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, peningkatan kapasitas aparatur gampong, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Diperlukan pula koordinasi yang lebih baik antar dusun dan peningkatan transparansi agar seluruh dusun dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pemerataan, Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial, Tata Kelola Pemerintahan.

## ABSTRACT

*Equitable infrastructure development is one of the important indicators in realizing community welfare at the village level. This study aims to determine how equitable infrastructure development is implemented in Gampong Uteun Bayi, Banda Sakti District, Lhokseumawe City, and to identify the factors that hinder its implementation. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through interviews with village officials, hamlet heads, and community members, as well as through observation and documentation of development activities in the field. The results show that the implementation of infrastructure development in Gampong Uteun Bayi has not been fully equitable across all hamlets. Several key factors contributing to this inequality include limited financial resources, low quality of human resources, and technical and administrative obstacles such as boundary disputes with neighboring villages. In addition, there are still people who are not aware of or are not involved in development planning deliberations (musrenbang), which shows that governance at the village level is not yet fully transparent and participatory. Nevertheless, the village government has made efforts to equalize development through planning that involves village officials. Development is carried out in stages in accordance with the budget and priority needs of the community in each hamlet. These efforts demonstrate the village government's commitment to promoting equitable development, even though its implementation still faces a number of problems. This study concludes that equitable infrastructure development in Gampong Uteun Bayi requires more effective financial management, increased capacity of village officials, and active community participation in every stage of development. Better coordination between hamlets and increased transparency are also needed so that all hamlets can enjoy the benefits of development in a fair and sustainable manner.*

**Keywords:** *Equitable Distribution, Infrastructure Development, Human Resources, Financial Resources, Governance.*